

# Tinjauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan (*Review of Village Fund Management Accountability: Influence of Competence, Leadership, Community Participation, and Supervision*)

Andrean Juli Ratmono<sup>1\*</sup>, Oman Rusmana<sup>2</sup>, Uswatun Hasanah<sup>3</sup>

Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah<sup>1,2,3</sup>

[andrean.ratmono@mhs.unsoed.ac.id](mailto:andrean.ratmono@mhs.unsoed.ac.id)<sup>1</sup>, [omanrsm@gmail.com](mailto:omanrsm@gmail.com)<sup>2</sup>, [uswatun.hasanah@unsoed.ac.id](mailto:uswatun.hasanah@unsoed.ac.id)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 2 Agustus 2023

Revisi 1 pada 16 Agustus 2023

Revisi 2 pada 19 Agustus 2023

Disetujui pada 21 Agustus 2023

## Abstract

**Purpose:** This study aims to elaborate and examines the influence of apparatus competence, leadership, community participation, and supervision on the accountability of perceived village fund management.

**Research methodology:** This research is a case study using a quantitative approach. The research was conducted in 11 villages in Jatilawang District. The study population was members of the Village Government Institutions consisting of village officials and the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) with a population of 215. The research sample was determined using a purposive sampling technique, with a total sample size of 110. Multiple linear regression was used for the data analysis.

**Results:** The results of the study show that (1) Aparattus Competence has a positive and significant effect on perceived village fund management accountability, (2) leadership has a positive and significant effect on perceived village fund management accountability, (3) community participation has a positive and significant effect on perceived village fund management accountability, and (4) supervision has a on perceived village fund management accountability.

**Keywords:** *Accountability, Village Fund, Apparatus Competence, Leadership, Community Participation, Supervision.*

**How to cite:** Ratmono, A, J., Rusmana, O., Hasanah, U. (2023). Tinjauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(4), 273-286.

## 1. Pendahuluan

Desa adalah bagian terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia sehingga dalam perkembangannya diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan ditujukan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan keadilan bagi masyarakat desa (Pemerintah Indonesia, 2014). Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada desa agar pelaksanaan tanggung jawab kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik (Rauf & Andriyani, 2023). Desa diberikan kewenangan guna keperluan percepatan pembangunan sehingga pembangunan antar desa bisa tercapai dengan merata. Percepatan pembangunan di setiap desa dapat didukung dengan adanya sumber daya yang memadai baik sumber daya keuangan, manusia serta hal lainnya yang mendukung. Dana desa dikeluarkan oleh pemerintah dilakukan sebagai cara bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di setiap desa. Dana desa merupakan bagian dari dana transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibagikan kepada setiap desa (Pemerintah Indonesia, 2014). Dana desa yang diterima oleh desa memiliki pengaruh yang besar apabila dapat dikelola dengan baik. Dana desa harus dikelola untuk kepentingan masyarakat secara luas sehingga angka kemiskinan juga akan berkurang.

Dana desa adalah bagian dari APBN sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan (Pemerintah Indonesia, 2003). Aturan tersebut tertuang pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan yang sama juga diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Keuangan Desa yang mengatur bahwa keuangan desa dalam pengelolaannya harus berasaskan akuntabel (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Pemerintah menyalurkan dana desa dengan nilai yang besar sehingga hal tersebut rawan akan penyimpangan dalam penggunaannya. Data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (2022) menyatakan bahwa sektor dana desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak yang berhasil tertangani, yaitu dengan jumlah 154 kasus. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabel sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Pengelolaan dana desa secara akuntabel sangat diperlukan sebagai wujud akuntabilitas. Akuntabilitas digunakan sebagai media untuk mengawasi dan menilai aktivitas atau tindakan yang dijalankan (Herliana & Rusmana, 2021). Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan variabel independen kompetensi aparat, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan pengawasan telah dilakukan sebelumnya dengan ditemukan perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019) menyatakan kompetensi aparat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa namun berseberangan dengan (Anggraeni & Yuliani, 2020). Variabel kepemimpinan menurut Krisnawati et al., (2020) berpengaruh positif namun tidak sejalan dengan Mahayani (2017). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif menurut Setyowati et al., (2020) namun berseberangan dengan Riyatna dan Gayatri (2021). Pengawasan menurut Ningsih (2021) berpengaruh positif namun berbeda dengan Riyadi & Kurnadi (2020) yang menyatakan pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dengan variabel kompetensi aparat, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa serta ingin menjawab pertanyaan riset melalui studi kuantitatif yang dikembangkan. Penelitian akan dilakukan pada desa di Kecamatan Jatilawang dengan populasi penelitian dari anggota Lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri dari Perangkat Desa dan BPD. Penelitian juga dilakukan karena motivasi untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan kepenulisan.

## **2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis**

### **2.1 *Stewardship Theory***

*Stewardship theory* dicetuskan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Teori ini beranggapan bahwa manusia adalah individu yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas sesuatu yang dipercayakan kepadanya (Davis et al., 1997). Seorang *steward* atau pelayan akan bekerja sesuai tujuan dari pemberi mandat sehingga akan mengesampingkan tujuan pribadinya (Davis et al., 1997). Peran seorang *steward* dapat memajukan organisasi atau meningkatkan kepuasan dari pihak yang berkepentingan (Davis et al., 1997). Anggapan tersebut tidak berarti bahwa seorang *steward* tidak memiliki kepentingan melainkan dengan bekerja untuk kepentingan yang lebih besar maka kepentingan pribadi turut serta tercukupkan (Davis et al., 1997).

### **2.2. *Teori Peran***

Teori peran menyatakan bahwa manusia memiliki perannya masing-masing dalam lingkup dimana individu berada (Biddle, 1986). Perilaku yang ditunjukkan individu didasarkan atas perannya masing-masing sehingga menjadi sebuah ciri khas yang membedakan antara peran satu dengan yang lain (Biddle, 1986). Tiga hal mendasar dalam sebuah peran yaitu identitas, perilaku yang khas, dan harapan (Biddle, 1986). Harapan muncul melalui perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh seorang individu dalam lingkungannya.

### **2.3 *Good Governance***

*Good governance* adalah tata kelola yang diterapkan oleh sebuah kekuasaan untuk mengelola sumber daya ekonomi maupun sosial yang berdasarkan atas persetujuan bersama untuk kepentingan ekonomi, politik dan sosial (United Nations Development Programme (UNDP), 1997). UNDP (1997)

menyatakan bahwa *good governance* memiliki berbagai prinsip dalam pelaksanaannya seperti *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability*, dan *strategic vision*. Tata kelola yang baik dapat dicapai apabila tata kelola terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat secara luas (Plumptre & Graham, 1999). Tata kelola pemerintah yang baik dapat diwujudkan apabila pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak terkait (Gibran et al., 2021).

#### **2.4 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk bertanggung jawab atas hal maupun tindakan yang dilakukannya dari pihak yang berhak menyampaikannya ke pihak yang berhak menerimanya (Jones, 1992). Akuntabilitas juga dikatakan sebagai pertanggungjawaban dari pihak yang diberi perintah kepada pihak yang memberikan perintah tersebut (Juliyanti, 2023). Akuntabilitas terdiri dari dua aspek yaitu hak dan kewajiban. Hak dimiliki oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Sedangkan kewajiban muncul untuk pihak yang melaksanakan kewajiban dan wajib untuk menyampaikannya ke pihak lain (Schedler et al., 1999). Akuntabilitas digunakan sebagai media untuk mengawasi dan menilai aktivitas atau tindakan yang dijalankan (Herliana & Rusmana, 2021).

#### **2.5 Kompetensi Aparat**

Kompetensi diartikan sebagai hal yang melekat pada diri seorang individu yang terdiri pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai (Robbins & Judge, 2009). Kompetensi dan kompeten adalah dua hal yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan diantara keduanya. Woodruffe (1993) membedakan antara kompeten dan kompetensi. Kompetensi memiliki keterkaitan dengan perilaku untuk melakukan sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dijalankan dengan baik. Kompeten diartikan sebagai suatu hal yang memiliki keterkaitan dengan kecakapan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan (Woodruffe, 1993). Kompetensi yang dimiliki seseorang akan memudahkan dalam memahami tugas yang diberikan (Dewi et al., 2022). Kompetensi akan mendorong pada pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintahan desa yang akuntabel dapat terwujud dari tata kelola keuangan yang baik (Andni & Hidayah, 2023).

#### **2.6 Kepemimpinan**

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang individu dalam mempengaruhi individu lainnya maupun kelompok dengan maksud untuk tercapainya sebuah tujuan yang sama (Robbins & Judge, 2015).. Pemimpin yang dapat dipercaya oleh pengikutnya maka akan memberikan dorongan untuk melampaui batas dari sekedar kepentingannya sendiri (Robbins dan Judge, 2015). Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki tanggung jawab utama bagi pelaksanaan fungsi organisasi (Dewi & Gayatri, 2019). Kepemimpinan dapat berperan untuk mengarahkan individu agar sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang dijalankan dengan baik akan menciptakan keberhasilan bagi organisasi yang dipimpinnya (Krisnanti et al., 2022).

#### **2.7 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas kegiatan dalam sebuah lembaga, organisasi maupun lingkup sosial untuk turut serta menciptakan kebijakan maupun membuat keputusan (Rowe & Frewer, 2004). Keikutsertaan masyarakat dalam penciptaan sebuah kebijakan akan membuat kebijakan tersebut memiliki kualitas yang baik karena masyarakat dapat turut serta mengusulkan sesuai keinginan dan harapan. Kontribusi masyarakat akan berperan dalam mengurangi tindakan pemerintah menyalahi aturan yang dilakukan melalui proses evaluasi (Putri & Maryono, 2022). Partisipasi masyarakat akan semakin mempercepat terciptanya akuntabilitas pada lingkungan pemerintahan desa (Sarah et al., 2020)

#### **2.8 Pengawasan**

Pengawasan menurut Committee Of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) (2013) adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komponen atau bagian dapat terlaksana sesuai dengan fungsinya. Pengawasan dilakukan sebagai bagian untuk mencapai tujuan

organisasi (Otley & Berry, 1980). Griffin (2021) menyebutkan ada tiga jenis dari pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan Dimensi Area. Pengawasan ini dilakukan pada empat area atau bidang dasar yaitu area fisik, sumber daya manusia, informasi dan keuangan.
- b. Pengawasan Dimensi Tingkat. Pengawasan ini dilakukan dengan membagi ke tingkat tertentu pada sistem organisasi. Tingkat pengawasan paling atas yaitu pengawasan strategi, disusul pengawasan struktur, dan pengawasan operasi serta keuangan dengan tingkatan yang setara.
- c. Pengawasan Tanggung Jawab. Pengawasan ini dilakukan oleh tingkatan tertinggi dalam sebuah organisasi, seperti manajer.

## **2.9 Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1 Pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kompetensi aparat menurut Wahyuni (2020) adalah keterampilan, sikap dan pengetahuan aparat yang didasarkan pada Standar Kompetensi Jabatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Aparat desa dengan kompetensinya akan membantu memahami aturan dan ketentuan dalam undang-undang sehingga pengelolaan atas sumber daya dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi aparat mendukung dalam terciptanya kesejahteraan kepada masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang akuntabel. Pandangan ini sejalan dengan *stewardship theory* yang menganggap bahwa *steward* atau perangkat desa akan bekerja sesuai dengan tujuan pemerintah desa selaku organisasi publik untuk memaksimalkan kepentingan dari pemberi tanggung jawab. Karo et al., (2022), Zulkifli et al., (2021) dan Siagian et al., (2022) menyimpulkan bahwasanya kompetensi aparat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

*H<sub>1</sub>: Kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

### **2.9.2 Pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kepemimpinan adalah daya upaya dari seorang individu untuk mempengaruhi dan menggerakkan individu lainnya dalam rangka pencapaian kesuksesan organisasi (Robbins dan Judge, 2015). Kepemimpinan dari seorang individu akan menyatukan antara tujuan individu dan tujuan organisasi (Rivai, 2020). Pemimpin memiliki kedudukan sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam setiap kegiatan operasional organisasi (Dewi & Gayatri, 2019). Kepemimpinan seorang pemimpin berperan mempengaruhi anggotanya, dan anggotanya menaruh harapan yang besar atas hadirnya seorang pemimpin. Pandangan tersebut sejalan dengan teori peran yang menyatakan bahwa setiap kedudukan atau identitas memiliki perannya masing masing dan ada harapan yang muncul dari hal tersebut. Dewi & Gayatri (2019), Sujatnika & Sulindawati (2022) serta Setyowati et al., (2020) menyimpulkan bahwasanya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

*H<sub>2</sub>: Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

### **2.9.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Putri & Maryono (2022) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai peran masyarakat melalui perwakilannya dalam lembaga pemerintahan untuk berpartisipasi dalam perumusan keputusan yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama harus diikutsertakan dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat mendukung teori peran yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam sebuah lingkungan sosial di mana individu berada dan ada harapan yang muncul atas peran yang dimiliki dari setiap individu (Biddle, 1986). Partisipasi masyarakat maka akan mendukung percepatan terciptanya akuntabilitas dalam pemerintahan desa (Sarah et al., 2020). Atiningsih dan Ningtyas (2019), Deviyanti dan Wati (2022) serta Dewi dan Erlinawati (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

*H<sub>3</sub>: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

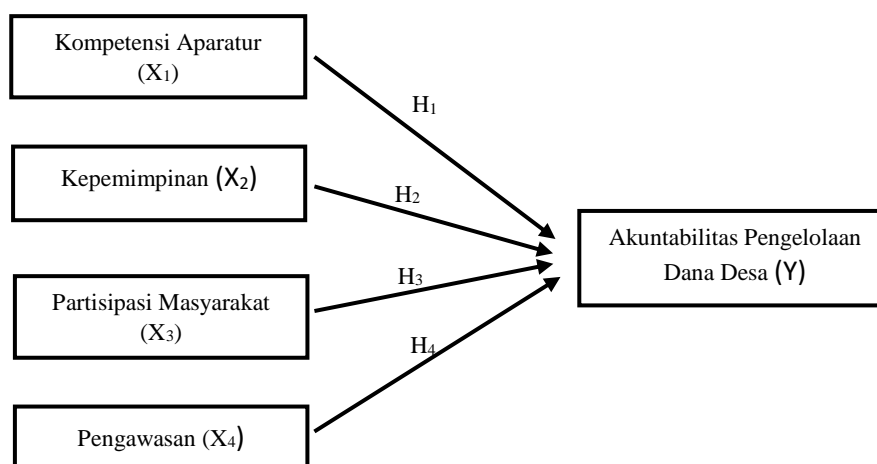
### **2.9.4 Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengawasan menurut COSO (2013) adalah aktivitas yang dilakukan untuk memastikan setiap bagian dapat terlaksana sesuai dengan fungsinya. Pengawasan berperan untuk melakukan upaya perbaikan atas kesalahan dari program yang dijalankan (Yaqin & Syafi'i, 2020). Selain itu, pengawasan dapat

digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian individu dalam melakukan pekerjaannya (Hutabarat, 2019). Kolaborasi pengawasan antara pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat tentunya akan memperkuat jalannya pengawasan. Sapartiningsih et al., (2018), Anggraeni & Yuliani (2020) serta Umaira & Adnan (2019) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

*H<sub>4</sub>: Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparat, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan pengawasan menurut pemahaman dari anggota Lembaga Pemerintahan Desa pada desa di Kecamatan Jatilawang. Populasi penelitian ini adalah anggota dari Lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan jumlah 215 orang. Sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kepala Dusun.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdiri dari Ketua BPD.
3. Menjabat minimal 1 tahun.

Berdasarkan pada kriteria didapatkan sampel berjumlah 110. Data penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 110 sampel penelitian dan didapatkan data yang dapat diolah sejumlah 78 kuesioner. Kuesioner yang dapat diolah tidak berjumlah penuh dikarenakan waktu pengumpulan data berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga pada saat penyebaran kuesioner, responden tidak sepenuhnya berada di kantor desa. Indikator dari setiap variabel penelitian diadaptasi dan dari penelitian terdahulu. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa ditentukan berdasarkan indikator kualitatif laporan keuangan menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Variabel kompetensi aparat diukur dengan 7 indikator dari Budiarto et al., (2020) dan Matani & Hutajulu (2020). Variabel kepemimpinan diukur dengan indikator dari Dewi & Gayatri (2019) dan Bonsu et al., (2022). Variabel partisipasi masyarakat diukur dengan 6 indikator dari penelitian Budiarto et al., (2020) dan variabel pengawasan diukur dengan 7 indikator dari Sapartiningsih et al., (2018). Pengukuran instrumen menggunakan skala likert. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan *software* SPSS 25. Uji data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan uji (f), uji (t) dan uji koefisien determinasi.

## 4. Hasil dan pembahasan

### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian dilakukan pada 11 desa di Kecamatan Jatilawang dengan didapatkan sampel sesuai kriteria berjumlah 110 kuesioner. Total jumlah kuesioner yang dibagikan berjumlah 110 lembar. Deskripsi mengenai hasil kuesioner tersaji pada Tabel 1:

Tabel 1. Hasil Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner dibagikan	110	100%
2.	Kuesioner hilang	5	5%
3.	Kuesioner tidak diisi	22	20%
4.	Kuesioner tidak dapat diolah	5	4%
5.	Kuesioner dapat diolah	78	71%

Sumber: Data diolah (2023)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang diisi oleh responden berjumlah 83 kuesioner dengan jumlah yang bisa diolah berjumlah 78 kuesioner atau sejumlah 71%. Rincian mengenai 83 responden yang berhasil dalam melakukan pengisian kuesioner tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Desa	4	5%
2.	Sekretaris Desa	9	11%
3.	Kaur Keuangan	10	12%
4.	Kaur Perencanaan	10	12%
5.	Kasi Pemerintahan	10	12%
6.	Kasi Kesejahteraan	10	12%
7.	Kepala Dusun	22	26%
8.	Ketua BPD	8	10%

Sumber: Data diolah (2023)

### 4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai data penelitian yang memuat nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
KA	78	24	34	27,83	2,620
K	78	28	40	34,43	3,030
PM	78	18	30	24,38	2,234
P	78	23	34	28,05	2,753
APDDP	78	26	38	33,39	2,889

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)

### 4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran data penelitian. Uji normalitas menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan data dikatakan normal apabila nilai signifikansi  $> 0,05$ . Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan *software* SPSS 25.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp.sig	A	Keterangan
Unstandardized Residual	0,200	0,050	Normal

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)

### 4.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidak korelasi antar variabel independen dalam sebuah model regresi. Tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Hasil uji multikolinearitas tersaji Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
Kompetensi Aparat	1,962	0,510	Tidak ada multikolinearitas
Kepemimpinan	1,634	0,612	Tidak ada multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	1,589	0,629	Tidak ada multikolinearitas
Pengawasan	2,063	0,485	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai VIF dari keempat variabel independen  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$  sehingga dapat dikatakan tidak terjadinya gejala multikolinearitas.

#### 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan variabel antara residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* dengan nilai signifikansi  $> 0,05$  menandakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No.	Variabel	Sig	Keterangan
1.	Kompetensi Aparat	0,783	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2.	Kepemimpinan	0,591	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3.	Partisipasi Masyarakat	0,531	Tidak terjadi heteroskedastisitas
4.	Pengawasan	0,999	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

#### 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji hubungan dan untuk mengetahui nilai ketergantungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig
Kompetensi Aparat	0,313	0,008
Kepemimpinan	0,228	0,014
Partisipasi Masyarakat	0,264	0,032
Pengawasan	0,241	0,034
Konstanta	3,651	

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 3,651 + 0,313X_1 + 0,228X_2 + 0,264X_3 + 0,241X_4 + e$$

#### 4.7 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi. Model regresi layak digunakan apabila  $\text{sig} < 0,05$  maka model regresi layak digunakan. Hasil uji F tersaji pada Tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji F

Fhitung	Fsig
27,384	0,000

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dan bisa untuk digunakan.

#### 4.8 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam sebuah model penelitian. Nilai signifikansi  $< 0,05$  menandakan hipotesis diterima. Hasil uji t tersaji pada Tabel 9:

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

No.	Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
1.	Kompetensi Aparat	0,008	Hipotesis Diterima
2.	Kepemimpinan	0,014	Hipotesis Diterima
3.	Partisipasi Masyarakat	0,032	Hipotesis Diterima
4.	Pengawasan	0,034	Hipotesis Diterima

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS

#### 4.9 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien yang semakin dekat dengan satu, menunjukkan semakin baiknya variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,775	0,600	0,578

Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2023)

Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,578 yang dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparat, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan pengawasan mampu menjelaskan variabel akuntabilitas sebesar 57,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian.

#### 4.10 Pembahasan

##### 4.10.1 Analisis pengaruh kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kompetensi aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin kompetennya aparat desa maka akan menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Aparat desa dengan kompetensi yang memadai maka akan memudahkan dalam memahami regulasi, ketentuan dan pengelolaan anggaran seperti dana desa. Dana desa yang dikelola dengan penuh pemahaman maka akan menciptakan pengelolaan yang akuntabel. Kompetensi yang dimiliki aparat mendukung penerapan *stewardship theory* yang menyatakan bahwa manusia memiliki sifat jujur, amanah dan dapat bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya (Davis *et al.*, 1997). Kompetensi dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki oleh seseorang (Robbins dan Judge, 2009). Kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa akan mendorong pada sikap jujur dengan patuh pada regulasi sehingga akan menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Gayatri (2019), Zulkifli *et al.*, (2021), Karo *et al.*, (2022), dan Siagian *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

##### 4.10.2 Analisis pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepemimpinan yang efektif dari kepala desa akan memberikan pengaruh bagi terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel. Kepala desa adalah *role model* bagi anggota di bawahnya. Kepala desa berkewajiban untuk mengarahkan anggotanya agar tindakannya tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Kepemimpinan dari kepala desa ini sejalan dengan teori peran yang digunakan dalam penelitian ini. Teori peran menyatakan bahwa peran menunjukkan perilaku apa yang akan ditampilkan dan ada harapan atas peran tersebut (Biddle, 1986). Peran dari kepala desa adalah memberikan motivasi, mengarahkan dan mendorong anggotanya untuk bertindak secara bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang telah diamanahkan. Harapan dari peran kepala desa adalah terciptanya pengelolaan dana



desa yang bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Gayatri (2019), Setyowati *et al.*, (2020), serta Sujatnika dan Sulindawati (2022) yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### *4.10.3 Analisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai pengawasan anggaran, maka akan semakin menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat berpartisipasi secara pasif maupun aktif. Partisipasi secara pasif dapat dilihat selaku penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan maupun anggaran. Peran aktif dapat berupa pengambilan keputusan, pelaksanaan program maupun dalam hal evaluasi. Peran serta masyarakat mendukung penggunaan teori peran yang menyatakan bahwa setiap kedudukan dalam lingkungan sosial memiliki perannya masing-masing dan ada harapan atas peran yang dijalankan. Peran masyarakat dapat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan turut serta melakukan pengawasan anggaran melalui keikutsertaan dalam pelaksanaan anggaran dana desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Dewi dan Erlinawati (2020) serta Deviyanti dan Wati (2022) yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### *4.10.4 Analisis pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*

Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan maka akan terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa bertujuan agar kegiatan yang didanai oleh dana desa maupun anggaran dana desa dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Pengawasan akan meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran karena pelaksanaan anggaran menjadi terpantau. Pengawasan juga dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan anggaran maupun kegiatan yang didanai oleh dana desa. Masyarakat dapat turut serta mengawasi pelaksanaan dana desa melalui keikutsertaannya dalam pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah selaku pemberi amanah dapat mengawasi secara berkala atas penggunaan anggaran. Pemerintah desa secara internal memiliki peran yang lebih besar untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh masing-masing perangkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Sapartingsih *et al.*, (2018), Umaira dan Adnan (2019) serta Anggraeni dan Yuliani (2020) yang menyimpulkan bahwasanya pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **5. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini adalah (a) Kompetensi aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (b) Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (c) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan (d) Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Limitasi dan Studi Lanjutan**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu *response rate* penelitian ini tidak mencapai 100% dan waktu pengumpulan data yang cenderung lama sekitar tiga minggu karena berdekatan dengan libur Hari Raya Idul Fitri sehingga penarikan kuesioner menjadi terhambat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan waktu pengumpulan data yaitu pada waktu yang tidak berdekatan dengan hari libur panjang. Penelitian hanya terbatas pada variabel kompetensi aparat, kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan pengawasan sehingga penelitian lanjutan bisa menambah variabel seperti komitmen organisasi, sistem pengendalian internal dan sebagainya.

## Referensi

- Andni, R., & Hidayah, N. (2023). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1788>
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Kajoran). *Journal Unimma, 2nd Prosiding Business and Economics Conference in Utilizing of Modern Technology 2019*, 266–284. Diakses 03 November 2022, dari <http://www.scholar.google.com>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14–25. <https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1.182>
- Biddle, B. J. (1986). Recent Development in Role Theory. *Annual Reviews of Sociology*, 12, 67–92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- Bonsu, A. B., Appiah, K. O., Gyimah, P., & Afriyie, R. O. (2022). Public Sector Accountability: Do Leadership Practices, Integrity and Internal Control Systems Matter? *IIM Ranchi Journal of Management Studies*. <https://doi.org/10.1108/irjms-02-2022-0010>
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Antecedent yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159. <https://doi.org/doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>
- Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission (COSO). (2013, June). *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance*. Diakses 06 Maret 2023, dari <https://www.coso.org>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2022). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mengwi, Kab Badung). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 36–48. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2547>
- Dewi, E. F., Sunarmo, A., Suyono, E., & Ulfah, P. (2022). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Independensi, Objektivitas, dan Pembagian Tugas terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 1(1), 74–102. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2022.1.1.6357>
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor desa se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 273–298. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.778>
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, Muh. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>
- Herliana, H., & Rusmana, O. (2021). Accountability For Immediate Assistance In Village Fund (Case Study in Lesmana Village, Banyumas Regency). *Sentralisasi*, 10(1), 7182. <https://doi.org/10.33506/sl.v10i1.1217>
- Hutabarat, L. N. (2019). Pengaruh Pengawasan, Budaya Organisasi dan Remunerasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 200–213. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3777>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Diakses 09 Maret 2023, dari [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

- Jones, G. W. (1992). The search for local accountability. In *Strengthening local government in the 1990s* (pp. 49–78). London: Loongman. Diakses 09 Maret 2023, dari <https://scholar.google.com>
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia (Public Accountability and Disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) in Indonesia). *Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS)*, 3, 1–17. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006>
- Karo, V. V. B., Simanjuntak, A., Ginting, M. C., & Sagala, L. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara dan Desa Aji Julu). *Jurnal Manajemen*, 8(1), 119–134. Diakses 12 Januari 2023, dari <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.
- Krisnanti, N. N. P., Padnyawati, K. D., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 124–130. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2288>
- Krisnawati, L. A., Yuniarta, G. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa dan Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tampaksiring. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(2), 22–32. <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i2.25332>
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129–144. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Matani, C. D., & Hutajulu, L. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(3), 21–45. <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i3.1532>
- Ningsih, L. P. P. S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa se-Kecamatan Ubud). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 183–198. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2010>
- Otley, D. T., & Berry, A. J. (1980). Control, Organisation and Accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 5(2), 231–244. Diakses 06 Maret 2023, dari <https://scholar.google.com>
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (60). Art. 60. [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Plumptre, T., & Graham, J. (1999). *Governance and Good Governance: International and Aboriginal Perspectives*. Diakses 08 Maret 2023, dari <https://iog.ca>
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1003>
- Rauf, A., & Andriyani, D. (2023). Analisis Implementasi Good Governance terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1850>
- Rivai, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. *Manegggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(2), 213–223. <https://doi.org/10.30596/manegggio.v3i2.5291>
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 160–168. <https://doi.org/10.31949/mr.v3i2.2438>

- Riyatna, K. D. D., & Gayatri. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Denpasar Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3273–3287. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p18>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). *Organizational Behavior*. Cape Town: Pearson Education South Africa. Diakses 06 Maret 2023, dari <https://books.google.co.id>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Organizational Behavior* (16th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Rowe, G., & Frewer, L. J. (2004). Evaluating public-participation exercises: A research agenda. *Science Technology and Human Values*, 29(4), 512–557. <https://doi.org/10.1177/0162243903259197>
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 100–114. Diakses 21 Desember 2022, dari <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2652>
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342. Diakses 15 Desember 2022, dari <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Schedler, A., Diamond, L., & Plattner, M. F. (1999). *The Self-restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Colorado: Lynne Rienner Publishers. Diakses 08 Maret 2023, dari <https://books.google.co.id/books>
- Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon. (2020). Antecedent Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1464>
- Siagian, L. N., Simanjuntak, A., & Situmorang, D. R. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Gusta, Desa Sunggal Kanan dan Desa Sei Mencirim). *Jurnal Manajemen*, 8(1), 1–16. Diakses 12 Januari 2023, dari <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 378–388. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471–481. Diakses 22 Desember 2022, dari <https://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/12580>
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance For Sustainable Human Development*. Diakses 09 Maret 2023, dari <https://www.undp.org>
- Wahyuni, S. (2020). Strategi Penguatan Kapasitas Lembaga Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur untuk Mewujudkan Learning Organization. *Jurnal Bestari*, 1(1), 32–46. <https://jurnalbestari.ntbprov.go.id>
- Woodruffe, C. (1993). What Is Meant by a Competency? *Leadership & Organization Development Journal*, 14(1), 29–36. <https://doi.org/10.1108/eb053651>
- Yaqin, A., & Syafi'i, I. (2020). Fungsi Pengawasan dalam Lembaga Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 Guna Menciptakan Profesionalitas Kerja. *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 1(2), 38–50. <https://doi.org/10.30762/joiem.v1i2.2155>
- Zulkifli, Sandrayati, & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26–38. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>

## Lampiran

Pernyataan setiap Variabel Penelitian		
Variabel	Indikator	Sumber
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan keuangan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di masa depan.</li> <li>2. Laporan keuangan dilaporkan secara rutin dan tepat waktu digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.</li> <li>3. Pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi APB Desa kepada masyarakat.</li> <li>4. Anggaran belanja penggunaannya digunakan di luar rencana APB Desa.</li> <li>5. Anggaran belanja dalam APB Desa digunakan sebagai batasan tertinggi dalam belanja anggaran.</li> <li>6. Bukti transaksi digunakan sebagai bukti pengeluaran anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan.</li> <li>7. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.</li> </ol>	PP No.71 tahun 2010 tentang SAP
Kompetensi Aparat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya mengetahui pengelolaan keuangan desa selaku pengguna dan pengelola anggaran.</li> <li>2. Pengetahuan yang luas dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan lebih lanjut.</li> <li>3. Kemampuan tentang pengelolaan keuangan desa hanya diperlukan oleh perangkat desa bagian keuangan.</li> <li>4. Solusi diberikan atas setiap kendala dalam bekerja.</li> <li>5. Inisiatif dalam bekerja dilakukan karena dapat mempercepat terselesaikannya sebuah pekerjaan.</li> <li>6. Membantu dalam pekerjaan tidak dilakukan karena setiap bagian sudah mendapatkan tugasnya masing-masing.</li> <li>7. Keramahan dan kesopanan dalam setiap pelayanan tidak diterapkan karena yang penting adalah profesionalitas.</li> </ol>	Budiarto et al., (2020) dan Matani dan Hutajulu (2020)
Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan yang dibuat melibatkan kepala desa sebagai pusat pengambilan keputusan.</li> <li>2. Kepala desa menghargai potensi anggotanya sebagai bentuk penghargaan atas kemampuan yang dimiliki.</li> <li>3. Kepala desa mengapresiasi anggotanya sebagai bentuk terima kasih atas kerja keras dalam sebuah pekerjaan.</li> <li>4. Kepala desa tidak mendengar dan menerima kritik karena hanya menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan atau program.</li> </ol>	Dewi dan Gayatri (2019) dan Bonsu et al., (2022)

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kerjasama dilakukan oleh kepala desa dan anggotanya sebagai satu kesatuan organisasi.</li> <li>6. Kepala desa tidak mendengar dan menerima pendapat serta masukan karena akan menghambat keputusan yang akan dibuat.</li> <li>7. Motivasi dan pengarahan diberikan oleh kepala desa agar anggotanya sejalan dengan tujuan pemerintah.</li> <li>8. Keikutsertaan kepala desa dalam menindaklanjuti keputusan yang dibuat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin.</li> </ol>	
Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan penyusunan program sebagai bagian dari pelaksana pembangunan.</li> <li>2. Masyarakat desa terlibat dalam mengusulkan rencana anggaran dana desa selaku penerima manfaat anggaran.</li> <li>3. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa karena memiliki hak dalam berpendapat.</li> <li>4. Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan karena itu sesuai dengan undang-undang desa.</li> <li>5. Masyarakat tidak terlibat aktif dalam pengawasan anggaran karena masyarakat tidak perlu tahu bagaimana pelaksanaan anggaran yang sudah direncanakan.</li> <li>6. Masyarakat tidak terlibat aktif memberikan penilaian atas pelaksanaan kegiatan anggaran karena masyarakat hanya sebagai penerima informasi atas pelaksanaan anggaran.</li> </ol>	Budiarto et al., (2020)
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan atas pelaksanaan APBDes dilakukan karena menyangkut pengelolaan keuangan negara.</li> <li>2. Pengelolaan atas dana desa tidak diawasi oleh masyarakat.</li> <li>3. Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal pemdes.</li> <li>4. BPD melakukan pengawasan keuangan desa.</li> <li>5. Pengawasan dilakukan secara preventif untuk mencegah tidak adanya kebijakan yang salah arah/bertentangan.</li> <li>6. Pengawasan secara represif dilakukan untuk membatalkan kebijakan yang telah dibuat yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.</li> <li>7. Pengawasan anggaran tidak dilakukan karena tidak memberikan manfaat dalam terlaksananya rencana anggaran dan kegiatan.</li> </ol>	Sapartiningsih et al., (2018)